

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

**INSPEKTORAT KABUPATEN MAGETAN
JL. TRIPANDITA NO 17 MAGETAN**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada akhirnya Rancangan Akhir Rencana Kinerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Magetan Tahun 2021 dapat disajikan untuk memberikan gambaran mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, yang dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Rancangan Akhir Rencana Kinerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Magetan Tahun 2021 pada hakikatnya merupakan perencanaan pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Sejalan dengan hal tersebut Inspektorat Kabupaten Magetan dalam kurun waktu setahun kedepan telah merencanakan kegiatan yang dirumuskan dalam rencana kerja tahunan sebagai sarana pengarah pencapaian tujuan sehingga tidak menyimpang dari apa yang diharapkan semula.

Dengan telah disusunnya Rancangan Akhir Rencana Kinerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Magetan Tahun 2021 ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait, khususnya Inspektorat Kabupaten Magetan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatannya.

Magetan, 11 Agustus 2020

Pit. INSPEKTUR KABUPATEN MAGETAN



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar belakang.....	1
1.2	Dasar Hukum Penyusunan.....	2
1.3	Maksud dan Tujuan.....	3
1.4	Sistematika Penulisan.....	4
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	7
	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian	
2.1	Renstra Perangkat Daerah.....	7
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	19
2.3	Isu-Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	23
2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	25
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	30
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	31
3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	31
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	32
3.3	Program dan Kegiatan.....	36
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	39
BAB V	PENUTUP	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja Inspektorat merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan perangkat daerah khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Renja Inspektorat mempunyai fungsi penting dan fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena renja Inspektorat adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan diperingkat yang lebih atas seperti RKPD dan RPJMD.

Rencana kerja Inspektorat adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang termasuk dalam ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah yang meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

Rancangan renja Inspektorat Kabupaten Magetan disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD tahun 2021 yang berada dalam masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023, Renstra Inspektorat dan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, rancangan awal RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif dalam Renja Inspektorat, sesuai dengan rencana program prioritas pada Inspektorat juga disusun berdasarkan Renstra Inspektorat, dimana Renstra Inspektorat menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Magetan ini adalah:

1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang _ Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana, pembangunan daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 21; tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4817;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah (berita Negara republic Indonesia tahun 2011 nomor 310)

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 23 tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Magetan;
15. Peraturan Bupati Magetan Nomor 59 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Magetan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Magetan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemkab Magetan Tahun 2018-2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Inspektorat Tahun 2021 adalah menetapkan dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan periode 1 (satu) tahun dan memberikan pedoman atau arah dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021, serta sebagai wadah sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakan isu-isu strategis tahun 2021.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah:

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Inspektorat Kabupaten Magetan dalam menentukan prioritas program/kegiatan tahunan berdasarkan APBD;
2. Sebagai standar baku penjabaran tupoksi Inspektorat, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan;
3. Menyediakan satu tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan organisasi;
4. Sebagai acuan pimpinan dan semua staf Inspektorat dalam melakukan fungsi-fungsi manajemen, demi terwujudnya optimalisasi tugas-tugas Inspektorat;
5. Agar Inspektorat mampu berperan sebagai fasilitator (mitra) bagi Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Magetan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, menurut prinsip-prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*.
6. Menjabarkan rencana strategis Inspektorat tahun 2018-2023
7. Menjadi acuan Inspektorat Kabupaten Magetan dalam mengimplementasikan RKPD Kabupaten Magetan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Magetan

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rangkaian pemikiran Rencana Kerja ini diformulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memuat uraian ringkas tentang dasar hukum yang berkaitan langsung dan digunakan dasar dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, baik yang berskala nasional, maupun daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Berisi tentang tujuan dan sasaran penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Berisi tentang sistematika penyajian/penyusunan Renja Perangkat Daerah.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan perkiraan capaian Tahun 2020, dikaitkan dengan target capaian Renstra.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria) dan SPM, maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK)

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan permasalahan dan hambatan, serta tantangan dan peluang dalam pelayanan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta isu – isu strategis lainnya.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para masyarakat, dan pengumpulan informasi dari pengamatan lapangan (Tabel T-C.32).

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Berisi informasi program dan kegiatan, target capaian kinerja beserta pagu indikatifnya.

BAB V PENUTUP

Berisikan hal-hal penting lainnya dianggap perlu.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Untuk Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2020 pada umumnya program / kegiatan telah tercapai sesuai dengan target kinerja yang telah direncanakan.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020
Kabupaten Magetan

Nama Perangkat Daerah :
Inspektorat

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD Tahun Lalu (2018)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fungsi Penunjang Urusan									
Pengawasan									
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	indeks kepuasan masyarakat	100 %	-	100 %	100 %	100	100 %	-	-
Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	terselenggaranya ketersediaan pelayanan jasa administrasi perkantoran	12 bulan	-	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	-	-
Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	terselenggaranya pelayanan perjalanan dinas dalam dan luar daerah	12 bulan	-	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	-	-
Survey Kepuasan Masyarakat	skor/nilai survey IKM	76 skor	-	75 skor	79.45 skor	105.93	76 skor	-	-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Layak Fungsi	100 %	-	100 %	100 %	100	100 %	-	-

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	60 kali	-	60 kali	60 kali	100	60 kali	-	-
Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor	12 Paket	-	12 Paket	12 Paket	100	12 Paket	-	-
Pengadaan Perlengkapan Kantor	jumlah perlengkapan kantor	7 unit	-	42 unit	44 unit	104.76	42 unit	-	-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Penyelesaian Penilaian Angka Kredit Aparatur Pengawas	100 %	-	100 %	100 %	100	100 %	-	-
Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional	Jumlah PFA yang dilakukan penilaian angka kredit	22 orang	-	22 orang	22 orang	100	22 orang	-	-
Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	100 %	-	100 %	100 %	100	100 %	-	-
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	jumlah dokumen perencanaan, anggaran, dan pengendalian yang dihasilkan	10 Dokumen	-	10 Dokumen	10 Dokumen	100	10 Dokumen	-	-
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	persentase penyelesaian dokumen pengawasan	100 %	-	100 %	100 %	100	100 %	-	-
Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	Jumlah SKPD yang diaudit	55 SKPD	-	55 SKPD	49 SKPD	89.09	55 SKPD	-	-
Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Jumlah rakorwas yang dilaksanakan	6 kali	-	6 kali	6 Kali	100	6 kali	-	-
Review Laporan Keuangan Daerah	jumlah dokumen laporan review LKD	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	-	-
Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah SKPD yang dilakukan evaluasi AKIP	55 SKPD	-	55 SKPD	55 SKPD	100	55 SKPD	-	-

Review Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	jumlah dokumen laporan review SAKIP	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	-	-
Monitoring tindak lanjut hasil pengawasan	Jumlah dokumen monitoring tindak lanjut hasil pengawasan	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	-	-
Review Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen review pengadaan barang dan jasa	4 dokumen	-	4 dokumen	4 dokumen	100	4 dokumen	-	-
Review Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran	jumlah dokumen laporan hasil review perencanaan dan penganggaran	12 dokumen	-	12 dokumen	12 dokumen	100	12 dokumen	-	-
Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Jumlah penanganan kasus pengaduan	- kasus	-	50 kasus	42 kasus	84	- kasus	-	-
Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Terselenggaranya koordinasi bidang pengawasan dengan instansi pengawas lebih tinggi	- bulan	-	12 bulan	12 Bulan	100	- bulan	-	-
Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	persentase tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang memiliki sertifikat diklat pengawasan	100 %	-	100 %	100 %	100	100 %	-	-
Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah tenaga pengawas yang menjadi peserta pelatihan	47 orang	-	47 orang	47 orang	100	47 orang	-	-
Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	persentase penanganan pengaduan masyarakat	100 %	-	100 %	100 %	100	100 %	-	-
Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Jumlah penanganan kasus pengaduan	50 kasus	-	- kasus	- kasus	-	50 kasus	-	-

Program Peningkatan Kinerja Pengawasan Sistem Pengelolaan Keuangan dan Pemerintah Daerah	persentase pemenuhan elemen kapabilitas SPIP	100 %	-	100 %	100 %	100	100 %	-	-
Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Jumlah dokumen Tingkat Maturitas SPIP	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	-	-
Peningkatan Kapabilitas APIP	Jumlah dokumen elemen/ infrastruktur sesuai dengan IACM	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	-	-
Program Peningkatan Pengendalian dan Sistem Pengawasan Pemerintahan Daerah	persentase implementasi kebijakan pencegahan dan pemberantasan KKN	100 %	-	100 %	100 %	100	100 %	-	-
Pengendalian Pengawasan Internal Perangkat Daerah	Jumlah pengendalian pengawasan internal terhadap gratifikasi	12 kali	-	12 kali	12 Kali	100	12 kali	-	-
Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar	Terselenggaranya kegiatan pencegahan dan pemberantasan pungutan liar	12 bulan	-	12 bulan	12 Bulan	100	12 bulan	-	-
Peningkatan Aksi Pemberantasan Korupsi	Jumlah dokumen laporan RAD PK	2 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	-	-
Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Terselenggaranya koordinasi bidang pengawasan dengan instansi pengawas lebih tinggi	12 bulan	-	12 bulan	12 Bulan	100	12 bulan	-	-

REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN 2019 INSPEKTORAT KAB. MAGETAN

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 s/d 2023 (periode Renstra SKPD)			Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2019 yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab
				5		Rp	7		Rp	12 = 8+9+10+11		Rp	13 = 12/7x100		
				K			K			K	Sat		K	Rp	
		Vol		Sat	Vol		Sat	Vol	Sat						
	1.20	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	indeks kepuasan masyarakat	79	angka	1,025,000,000									
1	1.20	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya ketersediaan pelayanan jasa administrasi perkantoran	60	bulan	850,000,000	12	bulan	311,000,000	12	bulan	285,464,700	91.79	Inspektorat	
2		Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Terselenggaranya pelayanan perjalanan dinas dalam dan luar daerah	60	bulan	100,000,000	12	bulan	20,000,000	12	bulan	19,900,000	99.50	Inspektorat	

3	1.20	Survey Kepuasan Masyarakat	skor/nilai survey IKM	385	skor	75,000,000	75	skor	15,000,000	79,45	skor	14,952,000	99.68	Inspektorat
Rata-rata capaian kinerja (%)													92.58	
Predikat kinerja													Sangat tinggi	Sangat tinggi
1.20	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Layak Fungsi	100	persen	675,000,000									
4	1.20	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	340	buah	400,000,000	60	kali	80,000,000	63	kali	79,973,679	99.97	Inspektorat
5	1.20	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor	60	paket	75,000,000	12	paket	15,000,000	12	paket	15,000,000	100.00	Inspektorat
6	1.20	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor	37	unit	200,000,000	42	unit	175,000,000	44	unit	174,451,400	99.69	Inspektorat
Rata-rata capaian kinerja (%)													99.79	
Predikat kinerja													Sangat tinggi	Sangat tinggi

	1.20	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	100	%	75,000,000									
7	1.20	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, anggaran, dan pengendalian yang dihasilkan	50	dokumen	75,000,000	10	dokumen	15,000,000	10	dokumen	15,000,000	100.00	Inspektorat	
		Rata-rata capaian kinerja (%)											100.00		
		Predikat kinerja											Sangat tinggi	Sangat tinggi	
	1.20	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Penyelesaian Penilaian Angka Kredit Aparatur Pengawas	100	persen	75,000,000									
8	1.20	Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional	Jumlah PFA yang dilakukan penilaian angka kredit	143	orang	75,000,000	22	orang	15,000,000	22	orang	14,611,350	97.41	Inspektorat	
		Rata-rata capaian kinerja (%)											97.41		
		Predikat kinerja											Sangat tinggi	Sangat tinggi	
	1.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian	persentase penyelesaian dokumen pengawasan	100	persen	7,715,000,000									

		kebijakan KDH													
6	1.20	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Jumlah SKPD yang diaudit	275	SKPD	4,750,000,000	55	SKPD	1,004,195,000	49	SKPD	997,218,900	99.31	Inspektorat	
7	1.20	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Jumlah penanganan kasus pengaduan	50	kasus	140,000,000	50	kasus	140,000,000	42	kasus	139,799,450	99.86	Inspektorat	
8	1.20	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	terselenggaranya koordinasi bidang pengawasan dengan instansi pengawas lebih tinggi	12	bulan	475,000,000	12	bulan	475,000,000	12	bulan	474,877,628	99.97	Inspektorat	
9	1.20	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Jumlah rakorwas yang dilaksanakan	30	kali	700,000,000	6	kali	148,000,000	6	kali	147,675,000	99.78	Inspektorat	
10	1.20	Reviu laporan keuangan daerah	jumlah dokumen laporan review LKD	5	dokumen	125,000,000	1	dokumen	17,900,000	1	dokumen	17,900,000	100.00	Inspektorat	
11	1.20	Evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Jumlah SKPD yang dilakukan evaluasi AKIP	320	SKPD	150,000,000	55	SKPD	19,100,000	55	SKPD	18,917,350	99.04	Inspektorat	

12	1.20	Reviu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	jumlah dokumen laporan review SAKIP	5	dokumen	100,000,000	1	dokumen	14,350,000	1	dokumen	14,267,300	99.42	Inspektorat
		Monitoring Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah dokumen monitoring tindak lanjut hasil pengawasan	5	dokumen	100,000,000	2	dokumen	20,000,000	1	dokumen	20,000,000	100.00	Inspektorat
13	1.20	Reviu Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen review pengadaan barang dan jasa	20	dokumen	50,000,000	4	dokumen	10,000,000	4	dokumen	9,993,000	99.93	Inspektorat
14	1.20	Reviu Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran	jumlah dokumen laporan hasil review perencanaan dan penganggaran	50	dokumen	1,125,000,000	12	dokumen	186,455,000	12	dokumen	167,105,000	89.62	Inspektorat
		Rata-rata capaian kinerja (%)											98.66	
		Predikat kinerja tinggi											Sangat tinggi	
	1.20	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	persentase tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang memiliki sertifikat diklat pengawasan	100	persen	1,750,000,000								

15	1.20	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah tenaga pengawas yang menjadi peserta pelatihan	235	orang	1,750,000,000	47	orang	675,000,000	47	orang	674,993,427	100.00	Inspektorat
		Rata-rata capaian kinerja (%)											100.00	
		Predikat kinerja											Sangat tinggi	Sangat tinggi
1.20		Program Peningkatan Kinerja Pengawasan Sistem Pengelolaan Keuangan dan Pemerintah Daerah	persentase pemenuhan elemen kapabilitas SPIP	100	persen	300,000,000								
		Peningkatan Kapabilitas APIP	Jumlah dokumen elemen/ infrastruktur sesuai dengan IACM	5	dokumen	150,000,000	1	dokumen	40,000,000	1	dokumen	39,950,000	99.88	Inspektorat
19	1.20	Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Jumlah dokumen Tingkat Maturitas SPIP	5	dokumen	150,000,000	1	dokumen	45,000,000	1	dokumen	41,370,000	91.93	Inspektorat
		Rata-rata capaian kinerja (%)											95.67	
		Predikat kinerja											Sangat Rendah	Sangat tinggi
1.20		Program Peningkatan Pengendalian dan Sistem Pengawasan Pemerintahan Daerah	persentase implementasi kebijakan pencegahan dan pemberantasan KKN	100	persen	2,220,000,000								

16	1.20	Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar	Terselenggaranya kegiatan pencegahan dan pemberantasan pungutan liar	60	Bulan	1,995,000,000	12	Bulan	320,000,000	12	Bulan	306,422,740	95.76	Inspektorat
		Pengendalian Pengawasan Internal Perangkat Daerah	Jumlah pengendalian pengawasan internal terhadap gratifikasi	60	kali	125,000,000	12	kali	70,000,000	12	kali	68,117,800	97.31	Inspektorat
17	1.20	Peningkatan Aksi Pemberantasan Korupsi	Jumlah dokumen laporan RAD PK	2	dokumen	225,000,000	2	dokumen	60,000,000	2	dokumen	25,971,500	43.29	Inspektorat
		Rata-rata capaian kinerja (%)											89.00	
		Predikat kinerja											Rendah	tinggi
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									13,835,000,000			3,891,000,000		3,783,932,224
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM KEGIATAN													97.25	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN													tinggi	Sangat tinggi

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan No 3 Tahun 2015, tentang penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023, bahwa Inspektorat Kabupaten Magetan telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat serta Norma dan standar pelayanan Inspektorat lainnya.

Capaian Indikator Kerja Utama Inspektorat Kabupaten Magetan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
a	b	c	d	E
1	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP (level)	3	2+
2	Meningkatnya penanganan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat	Persentase penanganan kasus ASN dan pengaduan masyarakat (%)	100	100
3	Meningkatnya Akuntabilitas keuangan dan kinerja SKPD	Opini BPK RI (opini)	WTP	WTP
		Rata-Rata Pencapaian Nilai AKIP SKPD (nilai)	BB	B
		Persentase SKPD yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan APIP (%)	100	100
		Persentase SKPD yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK (%)	90	100

Pencapaian kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Magetan Tabel T-C.30. adalah sebagai berikut :

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat
Kabupaten Magetan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD ***)	Target SPM	Target IKK	Target Renstra SKPD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi		Catatan Analisis
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Level Kapabilitas APIP			3	3	3	3	2	2	3	3	
2	Opini BPK (opini)			WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
3	Persentase tindak lanjut temuan sesuai rekomendasi hasil pemeriksaan APIP (%)			100	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase tindak lanjut temuan sesuai rekomendasi hasil pemeriksaan BPK (%)			90	90	90	90	90	100	90	90	
5	Persentase penanganan kasus ASN dan pengaduan masyarakat (%)			-	100	100	100	-	100	100	100	UNTUK TH 2019 DAN SELANJUTNYA INDIKATOR PENGADUAN MASYARAKAT DIGABUNG DENGAN KASUS ASN
6	Rata-rata pencapaian Nilai AKIP SKPD			B	B	BB	BB	B	B	BB	BB	UNTUK TH 2019 DAN SELANJUTNYA INDIKATOR DIHITUNG DARI RATA-RATA PENCAPAIAN NILAI AKIP

Berdasarkan tabel pencapaian kinerja Inspektorat Kab. Magetan tahun 2019 di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar target kinerja dapat tercapai. Namun masih ada beberapa target kinerja yang tidak tercapai.

Pada Tahun 2019, dari hasil penilaian secara mandiri terhadap peningkatan kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Magetan diperoleh hasil sebagai berikut:

- | | | |
|-------------|---|---|
| a. Elemen 1 | Peran dan Layanan berada di level | 3 |
| b. Elemen 2 | Pengelolaan SDM berada di level | 3 |
| c. Elemen 3 | Praktik Profesional berada di level | 2 |
| d. Elemen 4 | Akuntabilitas & Manajemen Kinerja berada di level | 3 |
| e. Elemen 5 | Budaya & hubungan Organisasi berada di level | 3 |
| f. Elemen 6 | Struktur tata Kelola berada di level | 3 |

Dari penilaian mandiri tersebut dapat disimpulkan bahwa kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Magetan masih berada di Level 2+.

Pada tahun 2019 Inspektorat menerima pengaduan sebanyak 42 kasus diantaranya kasus terkait pengaduan masyarakat sebanyak 23 kasus, perceraian sebanyak 12 kasus, indisipliner sebanyak 7 kasus dan seluruh kasus telah dilaksanakan pemeriksaan. Seluruh pengaduan masyarakat yang diterima oleh Inspektorat, sebanyak 42 (empat puluh dua) aduan seluruhnya telah ditindaklanjuti dengan demikian realisasinya 100%.

Sasaran pada indikator ini adalah kegiatan evaluasi SAKIP SKPD dimana pada tahun 2019 Inspektorat telah melakukan evaluasi terhadap 55 SKPD. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, elemen – elemen yang dinilai antara lain : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi internal dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi. Dari Hasil Evaluasi SAKIP yang dilakukan secara internal oleh Inspektorat terhadap SKPD, rata-rata pencapaian Nilai AKIP SKPD mendapatkan nilai B.

Berbanding lurus dengan kegiatan di atas, dapat disampaikan bahwa hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Magetan untuk tahun 2019 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga mendapatkan penilaian B. Meskipun hasil evaluasi AKIP Pemkab Magetan tetap B, apabila dibandingkan dengan tahun 2018, di tahun 2019 ada kenaikan nilai AKIP. Di tahun 2018 nilai AKIP sebesar 63,84 sedangkan di tahun 2019 menjadi 68,94. Ada kenaikan sebesar 5,10 angka. Hanya kurang 1,07 untuk mencapai BB.

Opini BPK Kabupaten Magetan setiap tahunnya selama lima tahun terakhir dapat memenuhi target yang diharapkan. Kabupaten Magetan

mendapatkan opini WTP yaitu wajar tanpa pengecualian, hal ini berarti pada saat dilakukan penilaian segala hal yang menyangkut material laporan telah jelas sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Opini BPK untuk Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magetan TA 2019 belum dapat disajikan karena masih dalam audit pendahuluan oleh BPK RI yang hasilnya baru dapat diketahui pada bulan Juni 2020.

2.3 Isu-Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Inspektorat Kabupaten Magetan dalam melaksanakan tugas dan fungsi di Bidang Pengawasan mempunyai fungsi yaitu merumuskan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan, melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati, menyusun laporan hasil pengawasan, melaksanakan administrasi Inspektorat dan melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selain tugas-tugas sebagaimana tersebut diatas terdapat kegiatan yang secara mandatori harus dilaksanakan oleh Inspektorat yaitu antara lain perhitungan kerugian Negara (PKN), Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar, Koordinasi antara APIP dan APH, Koordinasi dan supervisi pencegahan (Korupsi) KPK.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut Inspektorat mempunyai tugas yaitu membantu Bupati bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Adapun identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat dan Identifikasi isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Kapabilitas APIP masih belum optimal
2. Masih adanya kasus yang melibatkan ASN serta adanya pengaduan masyarakat.
3. Masih belum optimalnya SKPD dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP).
4. Tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan baik oleh APIP dan BPK RI belum seluruhnya ditindaklanjuti sesuai rekomendasi oleh SKPD.
5. Tuntutan pelayanan masyarakat (pengaduan masyarakat) terhadap pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan bersih dari KKN.
6. Peningkatan kinerja ASN
7. Pemahaman tentang SPIP dan pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan belum optimal

Dalam pelaksanaan kegiatan Inspektorat Kabupaten Magetan terdapat hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan pencapaian tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Jumlah SDM APIP yang ada belum memadai dengan latar belakang pendidikan yang beragam dan belum seluruhnya mengikuti pendidikan dan pelatihan sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA).
2. Strategi pengawasan belum memadai.
3. Sarana dan prasarana yang masih kurang memadai
4. Sarana pengaduan masyarakat kurang memadai.

Sejumlah kendala diatas akan menjadi pertimbangan penting dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang pengawasan dalam rangka evaluasi tugas-tugas Inspektorat untuk tahun berikutnya sehingga dapat dicapai kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, disamping kendala, Inspektorat Kabupaten Magetan mempunyai peluang dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain:

1. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang mendukung peran Inspektorat dalam pengawasan pemerintahan daerah
2. Adanya komitmen pimpinan daerah dalam penguatan lembaga pengawasan yang dituangkan dalam Piagam Audit Intern termasuk dalam peningkatan penerapan SAKIP.
3. Adanya kerjasama koordinasi dan sinkronisasi antara Aparat Pengawas Internal dan Aparat Pengawas Eksternal;
4. Adanya perjanjian kerjasama antara APIP dan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Pengaduan masyarakat.
5. Adanya peran serta masyarakat yang aktif untuk melaksanakan kontrol terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintah daerah.

Sedangkan tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain:

1. Pemahaman tentang SPIP dan pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan belum optimal.
2. Tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan baik oleh APIP dan BPK RI belum seluruhnya ditindaklanjuti sesuai rekomendasi oleh SKPD
3. Masih belum optimalnya SKPD dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP).
4. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap peran Inspektorat dalam pembangunan yang akuntabel, efektif, efisien dan transparan

Tantangan dan Peluang tersebut harus dijadikan acuan bagi Inspektorat Kabupaten Magetan untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan lebih baik demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Magetan ini.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rencana Program dan kegiatan pada Inspektorat Kabupaten Magetan Tahun 2021 mengacu pada RKPD Kabupaten Magetan Tahun 2021. Pada Tahun 2021 Inspektorat Kabupaten Magetan menetapkan 9 program dengan 24 kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditargetkan dalam setiap indikator kinerja program kegiatan, dengan anggaran sebesar **Rp. 3.270.000.000,-** (Tiga milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah), kegiatan yang dilaksanakan di fokuskan kepada 4 (empat) program Strategis untuk merealisasikan Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2021 dengan penjelasan sebagai berikut, yaitu :

1. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.
2. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
3. Program Peningkatan Pengendalian dan Sistem Pengawasan Pemerintah Daerah.
4. Program Peningkatan Kinerja Pengawasan Sistem Pengelolaan Keuangan Dan Pemerintah Daerah.

Seiring dengan penguatan APIP menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka pada tahun 2021 Inspektorat akan mengalami penambahan rincian belanja langsung yang dikeluarkan maka inspektorat mengajukan pagu menjadi sebesar **Rp. 5.485.000.000,-** (Lima milyar empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan program yang mengalami penambahan pagu anggaran antara lain :

1. Program pelayanan administrasi kantor Ranwal RKPD sebesar Rp 445.000.000 naik menjadi Rp 560.000.000,-
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Ranwal RKPD Rp 135.000.000,- naik menjadi Rp 335.000.000,-
3. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Ranwal RKPD Rp 1.420.000.000 naik menjadi Rp 2.618.000.000,- pertambahan tersebut karena adanya tambahan kegiatan reviu DAK, reviu Dana BOS, Reviu Dana Desa, Reviu LPPD, Reviu LKJIP, Monev Desa, Probity Audit dan Audit

Kinerja begitu juga pada kegiatan pengawasan secara berkala sesuai perbup perjalanan dinas dalam daerah pemberian uang saku APIP sebesar Rp 100.000,- per hari. Setiap tahun digelar Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) agar setiap tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban APIP.

4. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Ranwal RKPD Rp. 350.000.000,- naik menjadi Rp 600.000.000,- untuk kegiatan diklat APIP minimal 120 jam/tahun/APIP
5. Program Peningkatan Kinerja Pengawasan Sistem Pengelolaan Keuangan dan Pemerintah Daerah Ranwal RKPD dari Rp 30.000.000,- menjadi Rp 150.000.000,- dikarenakan adanya tambahan untuk tim Reformasi Birokrasi dan Tim Zona Integritas.
6. Program peningkatan pengendalian dan sistem pengawasan pemerintah daerah pada Ranwal RKPD Rp 930.000.000,- naik menjadi Rp 960.000.000,- karena berdasarkan Surat dari KPK nomor B/1803/LIT.05/10-15/02/2019 tanggal 15 Februari 2019 agar pemerintah daerah menganggarkan pelaksanaan kegiatan Survei Penilaian selain itu juga ada tim verifikasi LHKASN dan LHKPN.

Meningkatnya kualitas Sumber Daya APIP di bidang pengawasan dan semakin komplek permasalahan yang ditangani yang kesemuanya membutuhkan prioritas penanganan serta luasnya cakupan obyek pengawasan sehingga pada tahun 2021 Inspektorat Kabupaten Magetan merencanakan untuk penambahan pagu anggaran menjadi sebesar Rp. 5.485.000.000,- (Lima milyar empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) Sebagaimana tercantum dalam tabel T-C.31. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 dibawah ini:

TABEL T-C.31.
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2021
INSPEKTORAT KABUPATEN MAGETAN

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA AWAL RKPD			HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat						
	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	terselenggaranya ketersediaan pelayanan jasa administrasi perkantoran	Kabupaten	12 bulan	170,000,000	Kabupaten	12 bulan	345,000,000
	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	terselenggaranya pelayanan perjalanan dinas dalam dan luar daerah	Kabupaten	12 bulan	20,000,000	Kabupaten	12 bulan	200,000,000
	Survey Kepuasan Masyarakat	skor/nilai IKM	Kabupaten	77 skor	15,000,000	Kabupaten	77 skor	15,000,000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Layak Fungsi						
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Kabupaten	60 kali	80,000,000	Kabupaten	80 kali	100,000,000
	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor	Kabupaten	12 paket	15,000,000	Kabupaten	12 bulan	35,000,000
	Pengadaan Perlengkapan Kantor	jumlah perlengkapan kantor	Kabupaten	7 unit	40,000,000	Kabupaten	26 unit	200,000,000
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase penyelesaian penilaian angka kredit aparatur pengawas						
	Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional	jumlah PFA yang dilakukan penilaian angka kredit	Kabupaten	22 Orang	15,000,000	Kabupaten	33 orang	42,000,000

4	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu						
	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	jumlah dokumen perencanaan, anggaran, dan pengendalian yang dihasilkan	Kabupaten	10 dokumen	15,000,000	Kabupaten	10 dokumen	20,000,000
5	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	persentase penyelesaian dokumen pengawasan						
	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	Jumlah SKPD yang diaudit	Kabupaten	55 SKPD	950,000,000	Kabupaten	55 SKPD	913,000,000
	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Jumlah rakorwas yang dilaksanakan	Kabupaten	6 kali	140,000,000	Kabupaten	6 kali	801,600,000
	Review Laporan Keuangan Daerah	jumlah laporan review LKD	Kabupaten	1 dokumen	25,000,000	Kabupaten	1 dokumen	50,000,000
	Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah SKPD yang dilakukan evaluasi AKIP	Kabupaten	55 SKPD	30,000,000	Kabupaten	55 SKPD	50,000,000
	Review Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah dokumen Laporan Review SAKIP	Kabupaten	1 dokumen	20,000,000	Kabupaten	1 dokumen	60,000,000
	Monitoring tindak lanjut hasil pengawasan	Jumlah dokumen monitoring tindak lanjut hasil pengawasan	Kabupaten	1 dokumen	20,000,000	Kabupaten	0 dokumen	0
	Review Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen review pengadaan barang dan jasa	Kabupaten	4 dokumen	10,000,000	Kabupaten	0 dokumen	0
	Review Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran	Jumlah dokumen laporan hasil review perencanaan dan penganggaran	Kabupaten	9 LHR (review RPJMD, Renja & Renja Perubahan, RKPDP & RKPDP Perubahan, KUA-PPAS & KUPA-PPAS Perubahan, RKA & RKA Perubahan)	225,000,000	Kabupaten	21 LHR (review RPJMD Perubahan, Renja & Renja Perubahan, RKPDP & RKPDP Perubahan, KUA-PPAS & KUPA-PPAS Perubahan, RKA & RKA Perubahan, Review DAK, Review LPPD)	743,400,000
6	Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Cakupan pemenuhan tenaga fungsional pengawas & auditor						

	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparaturnya pengawasan	jumlah peserta pelatihan tenaga pengawas/auditor	Kabupaten	47 orang	350,000,000	Kabupaten	47 orang	600,000,000
7	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	persentase penanganan pengaduan masyarakat						
	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Jumlah penanganan kasus pengaduan	Kabupaten	50 Kasus	140,000,000	Kabupaten	50 Kasus	200,000,000
8	Program Peningkatan Kinerja Pengawasan Sistem Pengelolaan Keuangan dan Pemerintah Daerah	persentase pemenuhan elemen kapabilitas SPIP						
	Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Jumlah dokumen Tingkat Maturitas SPIP	Kabupaten	1 dokumen	30,000,000	Kabupaten	1 dokumen	50,000,000
	Peningkatan Kapabilitas APIP	Jumlah dokumen elemen/ infrastruktur sesuai dengan IACM	Kabupaten	1 dokumen	30,000,000	Kabupaten	1 dokumen	100,000,000
9	Program Peningkatan Pengendalian dan Sistem Pengawasan Pemerintahan Daerah	persentase implementasi kebijakan pencegahan dan pemberantasan KKN						
	Pengendalian Pengawasan Internal Perangkat Daerah	Jumlah pengendalian pengawasan internal terhadap gratifikasi	Kabupaten	12 kali	25,000,000	Kabupaten	12 kali	100,000,000
	Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar	Terselenggaranya kegiatan pencegahan dan pemberantasan pungutan liar	Kabupaten	12 Bulan	385,000,000	Kabupaten	12 Bulan	340,000,000
	Peningkatan Aksi Pemberantasan Korupsi	Jumlah dokumen laporan RAD PK	Kabupaten	2 dokumen	45,000,000	Kabupaten	2 dokumen	250,000,000
	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Terselenggaranya koordinasi bidang pengawasan dengan instansi pengawas lebih tinggi	Kabupaten	12 bulan	475,000,000	Kabupaten	12 bulan	270,000,000
TOTAL					3,270,000,000			5,485,000,000

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Untuk penyusunan Program Kegiatan Tahun Anggaran 2021. Inspektorat telah mengadakan Forum Perangkat Daerah pada 6 Maret 2020 tidak terdapat usulan program/ kegiatan dari SKPD. Inspektorat tidak mengusulkan program dan kegiatan yang menyentuh secara langsung akan kepentingan masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pasal 26 ayat (4) Inspektorat Kab/Kota melakukan kegiatan pengawasan terhadap :

- a. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kab/Kota;
- b. Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa; dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020
Kabupaten Magetan

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Seperti telah diketahui bahwa Pemerintah Pusat sekarang ini sedang melakukan penguatan Inspektorat Daerah melalui Peraturan Pemerintah Nomer 72 Tahun 2019. Penguatan Kelembagaan Inspektorat melalui :

1. Penambahan Fungsi
Pencegahan Korupsi dan Pengawasan RB menjadi Indikator Kinerja Inspektorat dan kelas jabatan Inspektur Daerah dapat dinaikkan setara dengan/minimal satu tingkat di bawah Sekda
2. Pola Pelaporan
LHP terkait indikasi kerugian disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Adanya Nota Kesepahaman antara Mendagri dengan Kepala BPKP tentang pelaksanaan supervisi hasil pengawasan, agar terjaga independensi APIP tidak ada intervensi oleh pihak manapun, mengoptimalkan fungsi BPKP sebagai bagian dari pengawasan internal serta pengawasan APIP terjaga kualitasnya sesuai dengan standar profesi
3. Penambahan Kewenangan
Penegasan fungsi Inspektorat Daerah sebagai perangkat Gubernur dan wakil pemerintah pusat
4. Kapasitas Kelembagaan
Penambahan 1 (satu) Irban untuk investigatif/penangan dumas. Terdapat unit kerja eselon III yang menangani fungsi secara khusus Pencegahan Korupsi dan Reformasi Birokrasi
5. Menjaga Obyektivitas Pengawasan
Pemberhentian dan pengangkatan inspektur harus izin mendagri dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Bertujuan agar seleksi jabatan Inspektur Daerah menghasilkan calon yang kompeten, terjaga Independensi Inspektur Daerah dan Inspektur Pembantu dalam melakukan pengawasan dan pola karier Inspektur Daerah dapat terjaga.

Selain itu prioritas penggunaan anggaran pengawasan digunakan untuk :

1. Pengawasan
 - a. Rutin : Reviu, audit, monev
 - b. Program Nasional : BOS dan PKS

- c. Evaluasi RB dan ZI
 - d. Penegakan Integritas LHKPN/LHKASN
2. Survey Penilaian Integritas
 - a. Kerjasama KPK
 - b. Kemendagri dan BPS
 3. Sarana Prasarana: Alat bantu pengawasan
 4. SDM Pengawasan. Pendidikan Profesional berkelanjutan 120 jam/APIP/tahun

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana visi Pemerintah Kabupaten Magetan yaitu “**Masyarakat Magetan yang SMART semakin Mantab dan Sejahtera**”, dengan serangkaian Misi Pemerintah Kabupaten Magetan yang diantaranya salah satu dari Misi tersebut adalah “Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil” artinya yaitu misi ini memiliki arah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, dengan cara peningkatan kualitas birokrasi yang profesional dalam pelayanan terhadap masyarakat yang adil. Pelayanan masyarakat ini didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Dengan demikian, kualitas birokrasi harus sejalan dengan keberhasilan pelaksanaan pelayanan aparat birokrasi dalam rangka menuju *Good Governance*. Untuk keberhasilan misi tersebut Inspektorat ada di dalamnya untuk mendukung misi tersebut maka perlu ditetapkan tujuan yang merupakan capaian yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dan sasaran yang merupakan capaian yang ingin dicapai setiap tahunnya. Melalui peningkatan SDM yang professional, dan dilandasi semangat otonomi daerah”, dikaitkan dengan isu strategis yang berkembang maka APIP yang profesional dimaknai bahwa Inspektorat sebagai sebuah lembaga pengawasan internal di lingkungan pemerintah diharapkan mempunyai independensi/kemandirian, integritas, kompetensi, dan netral. Hal tersebut menuntut konsekuensi aparaturnya terlebih untuk pengawas/auditor mampu mengimplementasikan tata nilai - tata nilai tersebut dalam pelaksanaan tugasnya, serta mematuhi kode etik dan norma pengawasan yang ada. Dalam rangka mendukung mencapai visi dan misi pemerintah Kabupaten Magetan, maka harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (jangka menengah) untuk kemudian dijabarkan ke dalam sasaran strategis organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu)

tahun sampai dengan 5 (lima) tahun. Untuk mencapai tujuan strategis tersebut selanjutnya diformulasikan sasarannya. Perumusan tujuan dan sasaran strategis tersebuthendaknya disertai indikator kinerja yang terukur. Hal tersebut akan bermanfaat nantinya bagi Inspektorat Kabupaten Magetan dalam mengukur sejauh mana capaian keberhasilan dalam menjalankan visi – misi pemerintah. Adapun tujuan dan sasaran strategis (jangka menengah) Inspektorat Kabupaten Magetan dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut:

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien Indikator Tujuan: 1. Opini BPK 2. Hasil evaluasi AKIP	1. Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP (level)	3	3	3	3	3
		2. Meningkatnya penanganan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat	a. Persentase penanganan kasus ASN dan pengaduan masyarakat (%)	100	100	100	100	100
		3. Meningkatnya Akuntabilitas keuangan dan kinerja SKPD	a. Opini BPK RI (opini)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			b. Rata-rata pencapaian nilai AKIP SKPD (nilai)	BB	BB	BB	A	A
			c. Persentase tindak lanjut sesuai rekomendasi hasil pemeriksaan : • APIP (%) • BPK (%)	100 90	100 90	100 90	100 90	100 90

Sesuai tabel tujuan dan sasaran strategis (jangka menengah SKPD) diatas, terdapat 2 tujuan yang ditetapkan berikut dengan indikator tujuan beserta sasaran dan indikator kinerjanya. Secara ringkas **Tujuan** diatas dapat dinarasikan sebagai berikut

“Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien”

Mengandung Makna bahwa pola kerja profesional harus lebih dikedepankan dengan mengembangkan sistem akuntabilitas kinerja birokrasi pemerintah sebagai tolok ukur keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah kepada masyarakat, dengan melakukan pemantauan, evaluasi dan penilaian kinerja yang didasarkan atas profesionalisme, etika APIP.

APIP harus dapat menyamakan persepsi dan menyatukan langkah dalam menjalankan tugas sesuai fungsi dan perannya sebagai aparat pengawasan intern. Tidak kalah pentingnya melaksanakan koordinasi dan komunikasi yang baik antara aparat pengawasan dengan para SKPD (Satuan Kereja Perangkat Daerah) untuk meningkatkan komitmen dan kesepahaman bersama dari unsur pimpinan tingkat atas, sampai kebawah dalam memperbaiki tata kelola keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan dan perundang undangan yang berlaku.

Pengawasan intern pemerintah merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Melalui pengawasan intern dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya

secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rancana, kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu, pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk mendorong *good governance* dan *clean government* dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta bersih.

Mengandung makna APIP bukan lagi hanya bergerak pada ranah pengawasan akuntabilitas keuangan dan profesionalitas kinerja para birokrat. Tetapi akan menjadi tumpuan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik maju dan modern dengan cara membangun kompetensi yang lebih tinggi dan kualitas kerja yang lebih baik, mewujudkan integritas auditor internal yang benar-benar independen, yang berorientasi pada perubahan ke arah yang lebih baik dan menjalankan fungsi assurance dan consulting yang membangun. Sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, pengawasan internal menjalankan fungsi dan perannya yang utama, yakni memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas, memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko serta memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Untuk mengukur capaian tujuan dan sasaran strategis tersebut, tidak semua indikator kinerja sebagaimana yang disajikan dalam tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD diatas digunakan dalam pengukuran keberhasilannya. Dalam rangka pengukuran capaian tujuan strategis hanya dipilih beberapa indikator yang mempunyai nilai strategis yang selanjutnya ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU beserta target yang ingin dicapai tahun 5 (lima) Tahun kedepan dapat dijelaskan sebagai berikut:

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT KABUPATEN MAGETAN**

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	TARGET	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1. Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level kapabilitas APIP	Level sesuai IACM	3	Inspektorat Kab. Magetan / Sekretariat	Inspektorat Kab. Magetan
2. Meningkatnya penanganan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat	Persentase penanganan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat (%)	$\frac{\text{Jumlah kasus ASN dan pengaduan yang ditangani}}{\text{Jml seluruh kasus ASN dan pengaduan}} \times 100$	100%	Inspektorat Kab. Magetan / Sekretariat	Inspektorat Kab. Magetan
3. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja SKPD	a. Opini BPK RI (opini)	Opini	WTP	Inspektorat Kab. Magetan/ Sekretariat	Inspektorat Kab. Magetan
	b. Rata-rata pencapaian nilai AKIP SKPD (nilai)	$\frac{\text{Jumlah Nilai AKIP Seluruh SKPD}}{\text{Jumlah seluruh SKPD}}$	BB	Inspektorat Kab. Magetan/ Sekretariat	Inspektorat Kab. Magetan
	c. Persentase SKPD yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan : • APIP (%) • BPK (%)	$\frac{\text{Jumlah TL sesuai rekomendasi}}{\text{Jml seluruh rekomendasi temuan APIP}} \times 100$ $\frac{\text{Jumlah TL sesuai rekomendasi}}{\text{Jml seluruh rekomendasi temuan BPK RI}} \times 100$	100% 90%	Inspektorat Kab. Magetan/ Sekretariat	Inspektorat Kab. Magetan

3.1. Program dan Kegiatan

Inspektorat Kabupaten Magetan pada tahun 2021 yakni tahun ke-3 dari pelaksanaan RENSTRA 2018-2023, telah menetapkan program / kegiatan Utama dan Program/Kegiatan Rutin dan Program Prioritas yang mendukung Tujuan Perangkat Daerah serta target kegiatannya. Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Magetan Tahun 2020 adalah sebagaimana berikut:

- Program dan kegiatan Rutin sebagai berikut :
 - 1) **Program Pelayanan administrasi perkantoran**
 - a) Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - b) Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah
 - c) Survey Kepuasan Masyarakat
 - 2) **Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur**
 - a) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - b) Pemeliharaan Perlengkapan Kantor
 - c) Pengadaan Perlengkapan Kantor
 - 3) **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**
 - a) Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional

- 4) Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah**
- a) Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah
- Program/Kegiatan untuk mendukung sasaran I Meningkatnya kapabilitas APIP adalah sebagai berikut :
 - 1) Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan**
 - a) Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
 - 2) Program Peningkatan Kinerja Pengawasan Sistem Pengelolaan Keuangan dan Pemerintah Daerah**
 - a) Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
 - b) Peningkatan Kapabilitas APIP
 - Program/Kegiatan untuk mendukung sasaran II Meningkatnya penanganan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat adalah sebagai berikut :
 - I. Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat**
 1. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
 - Program/Kegiatan untuk mendukung sasaran III Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan SKPD adalah sebagai berikut :
 - 1) Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**
 - a) Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
 - b) Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
 - c) Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
 - d) Reviu laporan keuangan daerah
 - e) Evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
 - f) Reviu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 - g) Monitoring tindak lanjut hasil pengawasan
 - h) Reviu Pengadaan Barang dan Jasa
 - i) Reviu Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran
 - 2) Program Peningkatan Pengendalian dan Sistem Pengawasan Pemerintahan Daerah**
 - a) Pengendalian Pengawasan Internal Perangkat Daerah
 - b) Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar
 - c) Peningkatan Aksi Pemberantasan Korupsi
 - d) Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Program kerja merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah ditentukan sebagai arah dari strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang sangat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja organisasi. Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan organisasi dalam merealisasikan program kerja yang ditetapkan.

Program kerja dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Magetan ini disusun juga dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*)". Inspektorat Kabupaten Magetan membantu Kepala Daerah melakukan pengawasan dan pembinaan pada seluruh SKPD Se-Kabupaten Magetan agar dalam menjalankan tugas-tugasnya selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Program dan kegiatan Inspektorat tahun 2021 seiring dengan penguatan APIP untuk menyesuaikan keadaan tersebut.

Dalam kaitan untuk mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 Inspektorat memiliki fungsi pengawasan, maka Rencana Kerja dan Pendanaan Inspektorat Kabupaten Magetan Tahun 2021 adalah sebagaimana tabel berikut:

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021
(NILAI PENETAPAN)

SKPD : [4.02.0101] INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	<i>Fungsi Penunjang Urusan</i>				5,485,000,000.00				3.270.000.000,00
	4.02	<i>Pengawasan</i>				5,485,000,000.00				3.270.000.000,00
	4.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat		78,4 Angka	560,000,000.00			78,4 Angka	205.000.000,00
1	4.02.01.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	terselenggaranya ketersediaan pelayanan jasa administrasi perkantoran	Kabupaten ()	12 Bulan ()	345,000,000.00		Penyesuaian anggaran sesuai kebutuhan	12 Bulan	170.000.000,00
2	4.02.01.022	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	terselenggaranya pelayanan perjalanan dinas dalam dan luar daerah	Kabupaten ()	12 Bulan ()	200,000,000.00		Penyesuaian anggaran sesuai kebutuhan	12 Bulan	20.000.000,00

3	4.02.01.023	Survey Kepuasan Masyarakat	skor/nilai survey IKM	Kabupaten ()	77 Skor ()	15,000,000.00		tetap/tidak ada perubahan	78 Skor	15.000.000,00
	4.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Layak Fungsi		100.00 %	335,000,000.00			100.00 %	135.000.000,00
4	4.02.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Kabupaten ()	60 kali ()	100,000,000.00		Kondisi kendaraan butuh perawatan yang besar karena tahun perolehan	60 kali	80.000.000,00
5	4.02.02.049	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor	Kabupaten ()	12 paket ()	35,000,000.00		Adanya penambahan perlengkapan kantor yang memerlukan pemeliharaan serta adanya pemeliharaan gedung	12 paket	15.000.000,00
6	4.02.02.050	Pengadaan Perlengkapan Kantor	jumlah perlengkapan kantor	Kabupaten ()	26 Unit ()	200,000,000.00		Dengan adanya penambahan personel perlu menambah pengadaan sarana prasarana kerja	7 Unit	40.000.000,00
	4.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Penyelesaian Penilaian Angka Kredit Aparatur Pengawas		100.00 %	42,000,000.00			100.00 %	15.000.000,00
7	4.02.05.012	Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional	Jumlah PFA yang dilakukan penilaian angka kredit	Kabupaten ()	33 Orang ()	42,000,000.00		adanya penilaian angka kredit untuk pejabat fungsional auditor dan P2UPD	33 Orang	15.000.000,00

	4.02.07	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu		100.00 %	20,000,000.00			100.00 %	15.000.000,00
8	4.02.07.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	jumlah dokumen perencanaan, anggaran, dan pengendalian yang dihasilkan daerah	Kabupaten ()	10 dokumen ()	20,000,000.00		Penyesuaian anggaran sesuai kebutuhan	10 dokumen	15.000.000,00
	4.02.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	persentase penyelesaian dokumen pengawasan		100.00 %	2,618,000,000.00			100.00 %	1.420.000.000,00
9	4.02.20.001	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	Jumlah SKPD yang diaudit	Kabupaten ()	55 SKPD ()	913,000,000.00		Penyesuaian anggaran sesuai kebutuhan.	55 SKPD	950.000.000,00
10	4.02.20.008	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Jumlah rakorwas yang dilaksanakan	Kabupaten ()	6 kali ()	801,600,000.00		Optimalisasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan APIP	6 kali	140.000.000,00
11	4.02.20.011	Review Laporan Keuangan Daerah	jumlah dokumen laporan review LKD	Kabupaten ()	1 dokumen ()	50,000,000.00		Penyesuaian anggaran sesuai kebutuhan	1 dokumen	25.000.000,00
12	4.02.20.012	Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah SKPD yang dilakukan evaluasi AKIP	Kabupaten ()	55 SKPD ()	50,000,000.00		Penyesuaian anggaran sesuai kebutuhan	55 SKPD	30.000.000,00
13	4.02.20.018	Review Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	jumlah dokumen laporan review SAKIP	Kabupaten ()	1 dokumen ()	60,000,000.00		Penyesuaian anggaran sesuai kebutuhan	1 dokumen	20.000.000,00

14	4.02.20.020	Monitoring tindak lanjut hasil pengawasan	Jumlah dokumen monitoring tindakan lanjut hasil pengawasan	Kabupaten ()		0.00		1 dokumen	20.000.000,00
15	4.02.20.021	Review Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen review pengadaan barang dan jasa	Kabupaten ()		0.00		4 dokumen	10.000.000,00
16	4.02.20.022	Review Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran	jumlah dokumen laporan hasil review perencanaan dan penganggaran	Kabupaten ()	21 dokumen (Review RPJMD Perubahan, Renja, Renja Perubahan, RKPD, P-RKPD, KUA PPAS, KUPA PPAS, RKA, RKA Perubahan, Review DAK, Review LPPD)	743,400,000.00	Bertambahnya kegiatan revidi Reviu LPPD, DAK 13 Dinas dan Dana Desa	10 dokumen	225.000.000,00
	4.02.21	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	persentase tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang memiliki sertifikat diklat pengawasan		100.00 %	600,000,000.00		100.00 %	350.000.000,00
17	4.02.21.001	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah tenaga pengawas yang menjadi peserta pelatihan	Kabupaten ()	47 Orang ()	600,000,000.00	Seiring Penguatan APIP, Diklat minimal 120 jam/tahun/APIP	47 Orang	350.000.000,00
	4.02.24	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	persentase penanganan pengaduan masyarakat		100.00 %	200,000,000.00		100.00 %	140.000.000,00
18	4.02.24.005	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Jumlah penanganan kasus pengaduan	Kabupaten ()	50 Kasus ()	200,000,000.00		50 Kasus	140.000.000,00

	4.02.52	Program Peningkatan Kinerja Pengawasan Sistem Pengelolaan Keuangan dan Pemerintah Daerah	persentase pemenuhan elemen kapabilitas SPIP		100.00 %	150,000,000.00			100.00 %	60.000.000,00
19	4.02.52.001	Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Jumlah dokumen Tingkat Maturitas SPIP	Kabupaten ()	1 dokumen ()	50,000,000.00		Dalam Peningkatan Maturitas SPIP APIP melibatkan Tim dari BPKP sebagai pendamping	1 dokumen	30.000.000,00
20	4.02.52.002	Peningkatan Kapabilitas APIP	Jumlah dokumen elemen/ infrastruktur sesuai dengan IACM	Kabupaten ()	1 dokumen ()	100,000,000.00		Dalam Peningkatan Kapabilitas APIP melibatkan Tim dari BPKP sebagai pendamping. Adanya tim Reformasi Birokrasi dan tim Zona Integritas	1 dokumen	30.000.000,00
	4.02.54	Program Peningkatan Pengendalian dan Sistem Pengawasan Pemerintahan Daerah	persentase implementasi kebijakan pencegahan dan pemberantasan KKN		100.00 %	960,000,000.00			100.00 %	930.000.000,00
21	4.02.54.001	Pengendalian Pengawasan Internal Perangkat Daerah	Jumlah pengendalian pengawasan internal terhadap gratifikasi	Kabupaten ()	12 kali ()	100,000,000.00		Penyesuaian anggaran sesuai kebutuhan. Adanya tim verifikasi LHKASN dan LHKPN	12 kali	25.000.000,00
22	4.02.54.002	Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar	Terselenggaranya kegiatan pencegahan dan pemberantasan pungutan liar	Kabupaten ()	12 Bulan ()	340,000,000.00		Penyesuaian anggaran sesuai kebutuhan	12 Bulan	385.000.000,00
23	4.02.54.003	Peningkatan Aksi Pemberantasan Korupsi	Jumlah dokumen laporan RAD PK	Kabupaten ()	2 dokumen ()	250,000,000.00		Adanya surat dari KPK untuk melaksanakan kegiatan SPI	2 dokumen	45.000.000,00

								dengan BPS		
24	4.02.54.004	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Terselenggaranya koordinasi bidang pengawasan dengan instansi pengawas lebih tinggi	Kabupaten ()	12 Bulan ()	270,000,000.00		untuk anggaran perjalanan dinas Luar Daerah digeser ke Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	12 Bulan	475.000.000,00
TOTAL						5,485,000,000.00				3,270,000,000.00

BAB VI PENUTUP

Sebagai upaya untuk mencapai visi dan misi organisasi diperlukan langkah-langkah yang sistematis, terukur, terencana dan berkesinambungan dari tahun ke tahun. Untuk tujuan tersebut maka disusunlah perencanaan kinerja atau Rencana Kinerja Inspektorat Kabupaten Magetan tahun 2021. Selain itu penyusunan Rencana Kinerja juga dimaksudkan agar organisasi dapat merumuskan langkah-langkah prioritas yang harus dilaksanakan untuk masa 1 (satu) tahun kedepan sehingga visi dan misi organisasi tetap dapat diwujudkan dan eksistensi organisasi dapat berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dalam rencana kerja

Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kabupaten Magetan Tahun 2021 merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat, dan dalam melaksanakan tugas-tugas pembinaan dan pengawasan. Selain itu pula diharapkan obyek yang diperiksa secara cepat dan tepat waktu dapat memenuhi kewajibannya memberikan tanggapan atas hasil temuan pemeriksaan (berupa tindak lanjut yang dilengkapi dengan bukti-bukti otentik yang diperlukan) sehingga Inspektorat secara keseluruhan dapat mencapai target dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun 2021.

Akhir kata, dengan tersusunnya Rencana Kinerja ini diharapkan setiap unsur aparatur dapat dengan sungguh-sungguh untuk bekerja keras sesuai dengan program dan kegiatan yang diusulkan guna mencapai hasil (*outcome*) yang optimal dan dampak yang maksimal sebagai perwujudan usaha seluruh jajaran Inspektorat Kabupaten Magetan Tahun 2021.

Magetan, 11 Agustus 2020

Pit. INSPEKTUR KABUPATEN MAGETAN

